

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menjalankan pemerintahan Daerah dan sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat (Ramandei, 2009).

Kinerja yang dicapai oleh organisasi pada dasarnya adalah prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah, konsep kinerja pemerintah daerah sendiri muncul ketika institusi pemerintah mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi *good governance*. Organisasi yang berhasil merupakan, organisasi yang memiliki visi dan misi secara terukur. Artinya bahwa visi dan misi tidak akan bermakna ketika tidak terakualisi dalam kinerja organisasi dalam kerangka dalam menciptakan *good governance*. Menurut Kumorotomo dkk (2005:103) kinerja organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien sesuai dengan kehendak pengguna jasa informasi, visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan sarana dan prasarana yang memadai.

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari anggaran, dalam melaksanakan aktivitas keuangan dibutuhkan anggaran. Penggunaan anggaran merupakan konsep yang sering digunakan untuk melihat kinerja organisasi publik. Anggaran yang disusun harus dengan pendekatan kinerja. Anggaran menjadi penting karena digunakan dalam mengalokasikan dana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan moneter (Mahsun, 2006). Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dalam menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja yang telah dianggarkan secara periodik. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran.

Menurut Fitri Anggraeni (2013) penyusunan anggaran sebaiknya memerlukan partisipasi dari anggota organisasi. Kondisi ini disebut partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran merupakan proses dimana individu-individu, baik atasan maupun bawahan terlibat dan mempunyai pengaruh dalam

menentukan target anggaran. Partisipasi anggaran (*participative budgeting*) melibatkan seluruh tingkatan manajemen dalam perusahaan tersebut, tujuannya untuk mengembangkan rencana anggaran yang telah dibuat. Partisipasi anggaran diperlukan karena bawahan lebih mengetahui kondisi secara langsung dilapangan pada bagiannya dibandingkan atasan pihak manajer.

Kurangnya partisipasi atau hanya sekedar berbicara tanpa berbuat terhadap masalah, dapat menimbulkan efek samping berupa berbagai perilaku disfungsional. Langkah untuk mencegah dampak disfungsional anggaran tersebut dengan memperbolehkan pegawai dan manajer tingkat bawah ikut berkontribusi untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Salah satu manfaat dari partisipasi dapat meningkatkan rasa kesatuan pada semua tingkatan manajemen (Putri, 2012: 6). Sedangkan menurut Sumarno dalam Fitri Anggraeni (2013: 3) menyatakan bahwa partisipasi dari bawahan dalam penyusunan anggaran mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut.

Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa partisipasi anggaran merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Hal ini dibuktikan juga dengan berbagai penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian Fitri Anggraeni (2013) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap

kinerja manajerial pada PT. Telekomunikasi Indonesia. Penelitian Kusuma (2016) juga menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kinerja organisasi dapat tercermin dari anggaran, pada pemerintah daerah kinerja dapat diukur melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seberapa baik kinerja pemerintah daerah akan terlihat dari realisasinya, semakin tinggi realisasi dari anggaran yang ditargetkan maka kinerja akan semakin baik. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo anggaran pendapatan pada tahun 2017 terlihat bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 diperoleh lebih rendah dari pada anggaran yang ditargetkan. Dimana pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp. 8.948.545.565 sedangkan yang terealisasikan hanya sebesar Rp. 8.495.370.162. Berdasarkan hasil persentasi capaian kinerja dalam memperoleh pendapatan adalah sebesar 94.94%.

Berdasarkan penjelasan fenomena diatas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh partisipasi anggaran meliputi: keterlibatan pegawai dalam penyusunan APBD (X_1), pengaruh untuk mencapai target (X_2) dan komitmen pada peningkatan motivasi dan budget (X_3) secara simultan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo .
2. Seberapa besar pengaruh partisipasi anggaran meliputi: keterlibatan pegawai dalam penyusunan APBD (X_1), pengaruh untuk mencapai target (X_2) dan komitmen pada peningkatan motivasi dan budget(X_3) secara parsial terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo .

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Besarnya pengaruh partisipasi anggaran meliputi: keterlibatan pegawai dalam penyusunan APBD (X_1), pengaruh untuk mencapai target (X_2) dan komitmen pada peningkatan motivasi dan budget(X_3) secara *simultan*

terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo .

2. Besarnya pengaruh partisipasi anggaran meliputi: keterlibatan pegawai dalam penyusunan APBD (X_1), pengaruh untuk mencapai target (X_2) dan komitmen pada peningkatan motivasi dan budget (X_3) secara *parsial* terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo .

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya sektor publik terkait dengan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Di samping itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan partisipasi anggaran yang dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah.